

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI INDONESIA

Nurul Arabia¹, Mustabsyirah², Abd Rizal³
Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: arabianurul45@gmail.com¹, mustabsyirah2024c@gmail.com², abd.rizal@usimar.ac.id³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka serta merumuskan strategi pengembangan koperasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan terbatas, dan wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan koperasi desa di Kolaka tidak terlepas dari lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya literasi kelembagaan di tingkat akar rumput, serta dominasi budaya usaha individual yang masih mengakar kuat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan geografis turut memperumit proses pengembangan koperasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan koperasi secara bertahap melalui proyek percontohan berbasis komoditas unggulan lokal, pelibatan aktif pemuda desa, dan penerapan teknologi digital sederhana yang sesuai dengan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran sebagai fasilitator utama dengan memastikan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola koperasi yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: Koperasi Desa, Kelembagaan, Koordinasi Lintas Sektor, Budaya Lokal, Strategi Pengembangan.

PENDAHULUAN

Koperasi desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan dan penguatan struktur sosial-ekonomi masyarakat desa (Iskandar & Permana, 2021). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program strategis, mendorong lahirnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai model koperasi berbasis komunitas yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa.

Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi kelembagaan, serta pola relasi sosial-ekonomi yang belum mendukung praktik usaha kolektif. Salah satu wilayah yang hingga kini belum memiliki Koperasi Desa Merah Putih adalah Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam seperti kelapa, kakao, dan perikanan, belum ada inisiatif konkret dari pemangku kepentingan untuk menginisiasi pendirian koperasi desa secara formal dan berkelanjutan (Putri & Santoso, 2023).

Ketiadaan koperasi ini di Kolaka tidak terlepas dari lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Selain itu, penyebaran informasi mengenai program nasional pendirian Koperasi Merah Putih belum merata, terutama di wilayah pedesaan terpencil. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi serta minimnya partisipasi dalam proses inisiasi. Di sisi lain, kultur masyarakat yang masih mengandalkan usaha individual atau kelompok informal semakin memperkuat resistensi terhadap sistem usaha kolektif (Nugroho, 2021).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan koperasi yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lokal, pelibatan tokoh adat dan agama, serta integrasi teknologi digital yang sederhana menjadi langkah penting dalam membangun fondasi koperasi yang kuat dan berkelanjutan (Handayani et al., 2022). Selain itu, penting pula untuk mengembangkan proyek percontohan berbasis komoditas unggulan desa sebagai langkah awal yang dapat direplikasi di desa lain. Peran generasi muda juga tidak boleh diabaikan, mengingat mereka memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi desa melalui inovasi dan kewirausahaan sosial (Hidayat & Fauzan, 2021).

Dengan demikian, upaya pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka menuntut sinergi antara berbagai pihak serta pendekatan yang holistik, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan kelembagaan. Kajian ini menjadi relevan untuk memberikan pemetaan tantangan sekaligus merumuskan strategi yang dapat diterapkan secara efektif guna mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan desa di Indonesia (Syamsuddin, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada fenomena belum terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika sosial, budaya, kelembagaan, dan struktural yang memengaruhi ketiadaan koperasi desa di wilayah tersebut. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah serta program nasional yang berkaitan dengan pengembangan koperasi. Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan pemerintah

daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, pendamping desa, serta pemuda desa yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam isu-isu pembangunan desa dan ekonomi kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka tidak dapat dilepaskan dari lemahnya hubungan koordinatif dan komunikasi antara para pemangku kepentingan yang relevan. Di berbagai daerah yang telah berhasil mengimplementasikan koperasi berbasis desa, keberhasilan tersebut umumnya didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, tokoh masyarakat, serta pendamping desa (Rahman, 2022). Sebaliknya, di Kolaka, pola koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal. Informasi terkait program nasional pendirian Koperasi Merah Putih belum terdiseminasi secara menyeluruh, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya kesadaran kolektif serta minimnya partisipasi masyarakat dalam inisiasi koperasi (Putri & Santoso, 2023).

Faktor lain yang turut menjadi kendala adalah kultur masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi praktik usaha individual atau kelompok informal. Meskipun secara potensial masyarakat memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan, pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari sistem usaha kolektif seperti koperasi masih tergolong rendah (Nugroho, 2021). Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan sosiologis yang memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran tokoh adat, tokoh agama, serta institusi pendidikan lokal sangat penting dalam proses internalisasi nilai-nilai koperasi di dalam struktur sosial masyarakat desa (Yuliani & Kurniawan, 2020).

Strategi pengembangan koperasi di Kolaka juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur wilayah yang cenderung heterogen. Beberapa desa berada di daerah yang sulit diakses dan mengalami keterbatasan dalam hal transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi produktif lainnya (Maulana & Sari, 2019). Oleh karena itu, model pengembangan koperasi yang dirancang harus adaptif dan kontekstual, misalnya melalui penerapan teknologi digital yang sederhana dan kompatibel dengan keterbatasan infrastruktur lokal, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (Handayani et al., 2022).

Implementasi proyek percontohan koperasi berbasis komoditas unggulan desa, seperti kelapa, kakao, atau hasil perikanan, dapat menjadi langkah awal yang strategis. Proyek semacam ini berfungsi sebagai laboratorium sosial sekaligus model replikasi bagi desa-desa lainnya (Ramdhan, 2020). Pengembangan koperasi tidak harus dilakukan secara serempak di seluruh wilayah, melainkan dapat dimulai secara bertahap pada desa-desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan dukungan sosial, dengan pendampingan teknis yang berkesinambungan (Zahra & Mukti, 2023).

Keterlibatan pemuda desa juga merupakan aspek yang krusial dalam proses revitalisasi koperasi. Peran generasi muda sebagai agen perubahan sosial dan inovator ekonomi perlu dioptimalkan melalui pelatihan kewirausahaan, literasi digital, serta penguatan kapasitas manajerial koperasi (Hidayat & Fauzan, 2021). Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan vokasional menjadi penting dalam menyediakan kurikulum dan modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan desa (Susanti & Widodo, 2022).

Di samping itu, aspek tata kelola koperasi yang baik harus menjadi perhatian utama. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan anggota (Kusuma, 2024). Untuk itu, penyediaan sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun akurat, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang melibatkan partisipasi aktif anggota koperasi, harus menjadi

bagian dari strategi pengembangan koperasi secara menyeluruh (Anwar, 2020).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan serta potensi yang tersedia, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka memerlukan pendekatan yang bertahap, sistematis, dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan (Iskandar & Permana, 2021). Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator utama, sementara keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta sinergi lintas sektor dalam membangun koperasi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan local (Syamsuddin, 2023).

Ketiadaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka tidak dapat dilepaskan dari lemahnya hubungan koordinatif dan komunikasi antara para pemangku kepentingan yang relevan. Di berbagai daerah yang telah berhasil mengimplementasikan koperasi berbasis desa, keberhasilan tersebut umumnya didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, tokoh masyarakat, serta pendamping desa (Rahman, 2022). Sinergi ini memungkinkan terbentuknya ekosistem yang kondusif bagi lahir dan berkembangnya koperasi desa. Sebaliknya, di Kolaka, pola koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal. Kurangnya forum koordinasi reguler, tidak adanya roadmap pembangunan koperasi desa, serta minimnya komitmen lintas lembaga menjadi penghambat utama. Informasi terkait program nasional pendirian Koperasi Merah Putih belum terdiseminasi secara menyeluruh, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya kesadaran kolektif serta minimnya partisipasi masyarakat dalam inisiasi koperasi. Kurangnya literasi kelembagaan dan kebijakan publik di tingkat akar rumput memperparah kondisi ini, menjadikan koperasi sebagai entitas yang asing dan tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat desa (Putri & Santoso, 2023).

Faktor lain yang turut menjadi kendala adalah kultur masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi praktik usaha individual atau kelompok informal. Pola ini sudah terbangun secara turun-temurun dan dianggap lebih fleksibel, meskipun tidak memberikan perlindungan atau keberlanjutan ekonomi jangka panjang (Nugroho, 2021). Meskipun secara potensial masyarakat memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan, pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari sistem usaha kolektif seperti koperasi masih tergolong rendah. Rendahnya pengalaman kolektif dalam membangun usaha bersama menyebabkan munculnya ketidakpercayaan antarwarga serta kekhawatiran akan konflik internal. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan sosiologis yang memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran tokoh adat, tokoh agama, serta institusi pendidikan lokal sangat penting dalam proses internalisasi nilai-nilai koperasi di dalam struktur sosial masyarakat desa (Yuliani & Kurniawan, 2020). Pendekatan kultural berbasis lokalitas menjadi salah satu strategi efektif untuk membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap sistem koperasi.

Strategi pengembangan koperasi di Kolaka juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur wilayah yang cenderung heterogen. Beberapa desa berada di daerah yang sulit diakses dan mengalami keterbatasan dalam hal transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi produktif lainnya (Maulana & Sari, 2019). Kondisi ini tidak hanya menghambat distribusi informasi dan barang, tetapi juga menyulitkan mobilisasi sumber daya serta implementasi pendampingan teknis secara rutin. Oleh karena itu, model pengembangan koperasi yang dirancang harus adaptif dan kontekstual, misalnya melalui penerapan teknologi digital yang sederhana dan kompatibel dengan keterbatasan infrastruktur lokal, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (Handayani et al., 2022). Penggunaan aplikasi koperasi digital berbasis android yang hemat data dan ramah pengguna dapat menjadi solusi strategis untuk memperluas

jangkauan layanan koperasi ke daerah terpencil.

Implementasi proyek percontohan koperasi berbasis komoditas unggulan desa, seperti kelapa, kakao, atau hasil perikanan, dapat menjadi langkah awal yang strategis. Proyek semacam ini berfungsi sebagai laboratorium sosial sekaligus model replikasi bagi desa-desa lainnya (Ramdhan, 2020). Selain memberikan contoh konkret bagaimana koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, proyek percontohan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan lokal, memperbaiki desain kelembagaan, serta menyusun sistem insentif yang relevan. Pengembangan koperasi tidak harus dilakukan secara serempak di seluruh wilayah, melainkan dapat dimulai secara bertahap pada desa-desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan dukungan sosial, dengan pendampingan teknis yang berkesinambungan (Zahra & Mukti, 2023). Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa setiap koperasi yang dibentuk benar-benar tumbuh secara organik dan sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Keterlibatan pemuda desa juga merupakan aspek yang krusial dalam proses revitalisasi koperasi. Peran generasi muda sebagai agen perubahan sosial dan inovator ekonomi perlu dioptimalkan melalui pelatihan kewirausahaan, literasi digital, serta penguatan kapasitas manajerial koperasi (Hidayat & Fauzan, 2021). Pemuda desa memiliki keunggulan dalam hal adaptasi terhadap teknologi serta keterbukaan terhadap gagasan baru, yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat modernisasi koperasi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan vokasional menjadi penting dalam menyediakan kurikulum dan modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan desa (Susanti & Widodo, 2022). Selain itu, penyediaan ruang kreatif seperti inkubator bisnis desa atau rumah inovasi koperasi akan mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi secara profesional.

Di samping itu, aspek tata kelola koperasi yang baik harus menjadi perhatian utama. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan anggota (Kusuma, 2024). Kasus-kasus penyalahgunaan dana koperasi di beberapa wilayah lain harus dijadikan pelajaran agar praktik serupa tidak terulang. Untuk itu, penyediaan sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun akurat, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang melibatkan partisipasi aktif anggota koperasi, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan koperasi secara menyeluruh (Anwar, 2020). Penguatan regulasi internal koperasi, termasuk audit berkala dan laporan terbuka, juga menjadi syarat mutlak untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan serta potensi yang tersedia, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka memerlukan pendekatan yang bertahap, sistematis, dan inklusif (Iskandar & Permana, 2021). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan. Keberhasilan pengembangan koperasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek tersebut secara harmonis dan kontekstual. Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator utama, sementara keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta sinergi lintas sektor dalam membangun koperasi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan local (Syamsuddin, 2023).

KESIMPULAN

ketiadaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya literasi kelembagaan, dan kuatnya budaya usaha individual. Ketidaktersediaan informasi yang memadai mengenai program nasional koperasi serta minimnya forum

koordinatif memperparah kondisi ketidakterlibatan masyarakat dalam inisiasi koperasi. Di samping itu, faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur turut menjadi penghambat serius dalam penyebaran gagasan dan pendampingan teknis koperasi di wilayah terpencil. Rendahnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang koperasi, ditambah ketidakpercayaan sosial dalam kerja kolektif, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang bersifat kultural, edukatif, dan inklusif.

Strategi pengembangan koperasi di Kolaka harus mempertimbangkan aspek lokalitas, kesiapan sumber daya, serta potensi komoditas unggulan yang dimiliki desa, melalui tahapan yang terukur dan berbasis proyek percontohan. Peran pemuda desa sebagai motor inovasi dan teknologi perlu didorong secara sistematis melalui pelatihan dan kolaborasi kelembagaan. Selain itu, tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya membangun koperasi di Kolaka membutuhkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada transformasi sosial dan kelembagaan yang kontekstual. Keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendukung dalam menciptakan ekosistem koperasi yang berdaya saing dan responsif terhadap tantangan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas Koperasi di Daerah*. Jakarta: Mitra Sejahtera Press.
- Handayani, T., Prasetyo, B., & Yusran, A. (2022). *Inovasi Digital untuk Koperasi Pedesaan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Nusantara.
- Hidayat, M., & Fauzan, R. (2021). *Peran Pemuda dalam Penguatan Ekonomi Desa Melalui Koperasi*. Yogyakarta: Cakrawala Bangsa.
- Iskandar, T., & Permana, R. (2021). *Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas di Wilayah Tertinggal*. Surabaya: Nusantara Mandiri.
- Kusuma, A. (2024). *Tata Kelola Koperasi yang Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Lembaga Studi Koperasi Indonesia.
- Maulana, D., & Sari, M. (2019). *Aksesibilitas dan Ketimpangan Wilayah: Studi Kasus di Sulawesi Tenggara*. Makassar: Universitas Negeri Makassar Press.
- Nugroho, A. (2021). *Budaya Ekonomi Lokal dan Tantangan Pengembangan Koperasi*. Bandung: Inti Media.
- Putri, S., & Santoso, E. (2023). *Evaluasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: Balitbang Koperasi.
- Rahman, F. (2022). *Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Koperasi Desa*. Malang: UB Press.
- Ramdhan, Y. (2020). *Proyek Percontohan Koperasi: Studi Lapangan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Mitra Desa.
- Susanti, D., & Widodo, H. (2022). *Kurikulum dan Pelatihan untuk Koperasi Milenial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, M. (2023). *Model Inklusif Pembangunan Koperasi Berbasis Potensi Lokal*. Kendari: LIPI Sultra.
- Yuliani, L., & Kurniawan, B. (2020). *Peran Sosial Tokoh Lokal dalam Pengembangan Kelembagaan Desa*. Semarang: Media Tani.
- Zahra, N., & Mukti, A. (2023). *Desain Bertahap Pendirian Koperasi Desa: Pendekatan Partisipatif*. Bandung: Literasi Ekonomi.